



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 08 April 2021

Halaman: 5

Omzet Pengusaha Malioboro

Turun Drastis

■ Pemkot Diminta Segera Lengkapi Fasilitas Penunjang Pedestrian

YOGYA, TRIBUN - Penerapan kawasan pedestrian Malioboro sejak November 2020 ternyata tidak sepenuhnya mendapat respon positif. Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) pun mengeluhkan dampak dari kebijakan tersebut, yang mengakibatkan unit usahanya sepi.

Ketua PPMAY, Sadono Mulyono, mengatakan, omzet mereka mengalami penurunan drastis semenjak kendaraan bermotor dilarang masuk kawasan Malioboro. Masalahnya, ia menilai, para pengunjung enggan berjalan jauh dari tempat parkir menuju lokasi, atau toko yang hendak dituju.

"Sekarang siapa yang mau jalan kaki dari (Tempat Khusus Parkir) Abu Bakar Ali ke Ramai Mall? Itu kan sangat jauh, ya, kalau tidak naik kendaraan bermotor," ujarnya, usai audiensi dengan Wali Kota Yogyakarta, Rabu (7/4) sore.

Dampaknya, penurunan omzet pun dirasakan hampir semua anggota PPMAY, karena kondisi Malioboro yang semakin sepi sejak pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, ia berharap, pihak Pemkot Yogyakarta bisa meninjau ulang kebijakan bebas kendaraan bermotor mulai pukul 18.00-21.00 tersebut.

"Secara signifikan ada mencapai 30 persen penurunannya, bahkan ada satu toko yang tutup, karena memang sama sekali tidak ada bisnis di sana, ya," keluh Sadono.

Ia mengungkapkan, sejauh ini PPMAY tidak berkontra dengan kebijakan tersebut.

BUTUH SOLUSI

- Pengusaha Malioboro mengeluhkan penerapan kawasan pedestrian Malioboro
- Omzet mereka mengalami penurunan drastis.
- Mereka meminta fasilitas penunjang pedestrian.
- Pemkot siap kaji aduan.

Hanya saja, untuk penerapannya, masih membutuhkan persiapan yang lebih serius. Pasalnya, untuk saat ini, ia menganggap, infrastruktur yang ada di kawasan Malioboro jauh dari layak untuk menunjangnya.

Salah satunya, terkait tempat khusus parkir di sirip-sirip Malioboro, yang sampai sekarang belum terwujud. Alhasil, kendala tersebut menimbulkan jarak antara pengunjung dengan toko yang berada di tengah Malioboro.

"Kalau infrastrukturnya belum lengkap, kembalikan dulu seperti semula, kan belum tertata secara rapi. Jadi, dengan kebijakan seperti itu, malah mengganggu bisnis kami. Toko bukanya ramai, malah semakin sepi," tandasnya.

Selain masalah parkir, PPMAY juga menyampaikan keluhan soal pedagang kaki lima yang hingga kini urung tertata rapi. Sadono mengatakan, pedestrian baik di sisi barat maupun timur, saat ini mulai dipilih pedagang liar yang dengan santainya membuka lapak di area kawasan pejalan kaki.

Terima Masukan

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, siap menindaklanjuti masukan, sekaligus keluhan PPMAY yang mengaku mengalami penurunan omzet sejak kendaraan bermotor dilarang melintas pukul 18.00-21.00 WIB. "Mereka memberi masukan, kita terima, kita kaji. Mereka menilai, itu membuat Malioboro sepi. Sudah sepi pandemi, ditambah kebijakan itu. Nah, kita coba kaji dulu," katanya, saat dikonfirmasi.

Hanya saja, Haryadi mengungkapkan, kebijakan mengenai Malioboro, tidak dapat diputuskan sepihak oleh Pemkot saja. Sebab, pihaknya harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY yang juga memiliki kewenangan. Sehingga, ia meminta kesabaran PPMAY.

"Kita akan sampaikan hal ini dalam rapat koordinasi antara Pemkot dengan Pemda DIY. Kebijakan Malioboro itu bagian provinsi juga. Jadi, kita tidak bisa serta merta mengambil keputusan begitu saja," tandas Wali Kota.

"Malioboro itu kan bukan hanya etalase kota, tetapi juga etalase DIY. Makanya, kita tidak bisa satu pihak saja untuk memutuskan soal masukan itu," lanjutnya.

Haryadi pun memastikan, kedepannya, bakal dibahas pula mengenai minimnya akses parkir di sirip-sirip Malioboro, yang dinilai mengakibatkan pengunjung enggan masuk menuju kawasan tersebut. Ia berjanji, akan menjalin koordinasi untuk mencari solusi terbaik. (alka)

anjut
inggapi
etahui
rs

1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005